



No. Alumni Universitas:

Monica Wieke

No. Alumni Fakultas:

- (a) Tempat/Tgl.Lahir: Bukittinggi/19 Oktober 1992
 (b) Nama Orang Tua: Toni Gucci dan Deswarni
 (c) Fakultas: Hukum
 (d) PK: Sistem Peradilan Pidana (V)
 (e) No BP: 1010112128

- (f) Tanggal Lulus: 07 April 2014
 (g) Predikat Lulus: **Dengan Pujian**
 (h) IPK: 3.52
 (i) Lama Studi: 3 tahun 8 bulan
 (j) Alamat: Jl. Bandarejo Simpang
 Ampek Kelurahan Lingsuang
 Aua

Penyitaan Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

(Monica Wieke, 1010112128, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK V (Sistem Peradilan Pidana), 63
halaman, Tahun 2014)

(Pembimbing: Prof.DR.H.Elwi Danil SH,MH, Pembimbing II: Shinta Agustina SH,MH)

ABSTRAK

Banyak kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh KPK dilakukan oleh para penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum. Munculnya penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik menjadi hal yang menarik perhatian masyarakat umum. KPK diduga telah melakukan penyitaan diluar kewenangannya. Permasalahan dalam skripsi adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan barang bukti tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK? 2) Apa saja kendala-kendala dalam melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi? 3) Apa saja upaya yang dilakukan KPK dalam mengatasi kendala tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah *juridis sociologis*. Hasil penelitian memperlihatkan: 1) Pelaksanaan penyitaan dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penyidik KPK dapat menyita benda-benda yang bisa dijadikan alat bukti maupun barang bukti dalam proses persidangan. Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik tersangka yang diduga hasil dari TPPU yang predikat crimanya tindak pidana korupsi. 2) Kendala utama KPK saat proses penyitaan barang yang akan disita telah dipindah tangankan dan terkadang benda sitaan berada jauh. 3) Untuk mengatasi kendala yang ada KPK membentuk unit Labuksi, dalam mengawasi alat bukti dan benda sitaan. Untuk memperbaiki penegakan hukum kedepan perlu dilakukan: 1) Penambahan anggota Labuksi untuk mengawasi serta merawat benda sitaan. 2) KPK perlu menambah sumber daya manusia terutama di bidang penyelidikan dan penyidikan. Guna mempermudah proses penyitaan barang-barang yang berada di luar kota 3) KPK menjalin kerjasama dengan instansi terkait. Hal ini diharapkan dapat menjadi usaha percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 07 April 2014.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<u>Hj. Aria Zurnetti, SH., MH</u>	<u>Nilma Suryani, SH., MH</u>

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan: